

2 alinea 2 Undang–Undang Dasar Nomor 7 tahun 1985 tentang peradilan agama. Selanjutnya dalam mengabulkan gugat cerai pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 044/PTA/Bandung/2018, mendasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Juncto Pasal 33 Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 , Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Dalam putusan tersebut Hakim sebaiknya mengaitkan juga Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang perkawinan menyebutkan bahwa “Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.”dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi.

B.Saran

Hendaknya Hakim dalam memutuskan perkara lebih teliti dan cermat, sehingga putusan yang di kenalkan lebih menjamin kepastian hukum, manfaat dan keadilan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Affandi, Ali,1984,*Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*,Pt Rineka Cipta jakarta.
- Harahap,M,Yahya, 1975, *Hukum Perkawinan Nasional*,ZahirTrading co,Medan
- Marhamah, Khaulah. 2014. *Religiussitas dan Reselisiensi Remaja Muslim dari Orang Tua Bercerai*.Universitas Pendidikan Indonesia:Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana

Muhhamad,2013,*Hukum Perceraian*, Sinar Grafika Jakarta

Mukhtar, Kamal.1987. *Asas-Asas Tentang Perkawinan*. Bulan Bintang: Jakarta.

Prakoso,joko, dan Ketut I Mustika, *Asas –Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*
PT Bina Aksara: Jakarta 1987

Satrio,J, 1988 ,*Asas - Asas Hukum Perdata*, Hersa :Purwokerto

Subekti,Trusto.Tahun 2013.*Hukum Keluarga dan Perkawinan*.Bahan
Pembelajaran Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman: Purwokerto

Sudarsono.2010.*Hukum Perkawinan Nasional*. Rineka Cipta:Jakarta.

Susilo ,Budi.2008 . *Prosedur Gugatan Cerai*. Pustaka Yustisia;Yogyakarta.

Peraturan Perundang - undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
(Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1974 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 30)

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang–Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 1975 Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan.

